

BAB I

Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Timur tidak dapat diabaikan oleh ASEAN. Kemajuan drastis dari perkembangan ekonomi di negara-negara Asia Timur menjadi suatu *new emerging markets*. Selain itu bersamaan dengan itu kemajuan ekonomi Jepang yang sudah canggih dan berjalan cepat, serta ketangguhan daya saing ekonomi Korea Selatan menjadikan kebersaingan tersendiri bagi ASEAN. Kekuatan interaksi dan integrasi ekonomi diantara negara-negara tersebut telah membuat mereka muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia yang patut diperhitungkan.

Berlatar belakang dari hal-hal tersebut maka pada Desember 1997 ASEAN, melalui '*informal summit*' di Malaysia yang mengundang para pimpinan dari China, Jepang dan Korea Selatan di sepakati terbentuknya ASEAN+3, pada pertemuan tersebut dapat disarikan:

If ASEAN is to have a bigger say in trade negotiation internationally, then it must work together with the East Asian Countries. The East Asia Economic Group or EAEG will be sufficiently strong to gain the respect of both the AC and the NAFTA. Even presently the country of South East and East Asia together form a formidable market. But the potential for growth of the EAEG is far greater than that of the EC and NAFTA. This fact will also increase the cluot of the EAEG....¹

Berangkat dari pertemuan ini kemudian secara berkala menjadi forum dialog antara 10 negara ASEAN dan 3 negara Asia Timur tersebut.

ASEAN sebagai contoh regionalisme dapat memberikan pandangan dan pemikiran dalam menentukan arah kemana regionalisme baru Asia Timur akan berkembang. Keberhasilan dan hambatan-hambatan ASEAN dalam melangkah maju menunjukkan wilayah ini sungguh-sungguh bergerak walaupun lambat dan berhati-hati kearah regionalisme yang lebih eksklusif.

¹ Severino, Rodolfo C. (2006). *South East Asia in Search of an ASEAN Community*. Singapore:ISEAS. hal. 265.

Dalam laporan penelitiannya tentang peran ASEAN dalam kerjasama regional AEC, Chiratvitat (2004) mengungkapkan sedikitnya ada 3 alasan ASEAN untuk berpikir bagaimana regionalisme Asia Timur dapat bekerja; (1) Bahwa ASEAN telah melakukan dengan regionalismenya sendiri dan koneksinya untuk melebarkan kerjasama Asia Timur. Bagi ASEAN, terus bermain dalam perannya didalam mempromosikan kerjasama regionalisme Asia Timur yang lebih luas, sangatlah penting bahwa ASEAN harus meneruskan untuk memperluas dan memperdalam integrasi ekonominya sendiri. Dalam pertemuan di Bali tahun 2003, Asean berhasil membentuk ASEAN Economic Community (AEC) setelah satu decade dari AFTA. Pada hakekatnya, AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang bercirikan pergerakan bebas barang, jasa, modal dan investasi pada 2020. Dalam usaha ini bagaimanapun ASEAN juga perlu untuk mengidentifikasi gap negara anggota yang kurang berkembang seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV); (2) kurang jelas dan transparannya kepemimpinan di Asia telah menyebabkan ASEAN menjadi perantara de facto atau pusat dari bentuk regional ini. Tapi pusat peran ASEAN untuk membawa ASEAN+3 tidak semata-mata merupakan tanggung jawab kelompok. Pada poin yang sama dalam waktunya, China dan Jepang, kandidat alami untuk kepemimpinan Asia Timur telah memainkan peranannya sendiri. Secara alami, ASEAN menginginkan dua bangsa kuat tersebut untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan mereka dalam menentukan tanggal kembali ke Perang Dunia II. ASEAN sesungguhnya telah melindungi kerjasama ekonominya melalui kerangka kerja ASEAN+1. karena munculnya China, tokoh asia yang baru ini telah menyebabkan ASEAN ntuk memasuki Comprehensive Economic Partnership (CEP) hingga memasukkan kesepakatan kerangka kerja FTA tahun 2002. kemudian, ASEAN telah disimpulkan sebagai persekutuan ekonomi yang baik dengan Jepang dan India pada pertemuan Bali. Bagi Jepang, perlu untuk berhati-hati dengan tantangan China. Bagi India, hal tersebut merupakan bagian dari *Look East Policy* dan perubahannya yang meningkat dengan kawasan.; (3) bahwa regionalisme Asia Timur yang baru juga telah mempertimbangkan perkembangbiakkan FTA di kawasan. Antara dua upaya keras untuk menciptakan East ASEAN FTA dan banyaknya FTA bilateral yang

telah ditandai dan dinegosiasikan, ini menaikkan kepentingan bahwa persetujuan itu akan menargetkan untuk berkumpul artikel 24 keajiban WTO atau lebih baik masih WTO plus.; (4) Dari sudut pandang negara-negara Asia Timur Laut, Asia Tenggara merupakan wilayah yang sangat potensial. Hal tersebut terkait dengan 3 unsur ekonomi yang dimiliki oleh kawasan Asia Tenggara, yaitu kekayaan sumber daya alam, pasar yang aktif dan luas, serta tenaga kerja yang murah dan bermutu. Sedangkan bagi negara-negara Asia Tenggara, wilayah Asia Timur Laut memenuhi dua syarat ekonomi yaitu penyediaan modal serta teknologi maju.

Pada mulanya ASEAN sendiri didirikan adalah sebagai kerjasama yang berorientasi politik. Kerjasama regional ini sekarang sudah memiliki 10 negara anggota. Seiring dengan berjalanya waktu dan kebutuhan ekonomi semakin meningkat, ASEAN semakin diperkuat dengan semangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Kerja sama tersebut merupakan antara lain percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan social dan budaya dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan kemitraan, sehingga menjadi landasan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera dan damai.

Krisis ekonomi pada 1997 juga sedikit banyak mempengaruhi kerjasama ASEAN. Diantaranya ketika kepala negara ASEAN kembali merumuskan “ASEAN Vission 2020” di Kuala Lumpur. Hal tersebut membuat pembentukan 3 pilar dalam ASEAN yaitu ASEAN Community, ASEAN Security Community dan ASEAN Socio-cultural Community. Ketiga pilar tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan saling memperkuat tujuan perdamaian yang berkelanjutan.

Kemudian di Bali diadakan Bali Concord II guna merumuskan tujuan akhir intgrasi ekonomi. Pencapaian dilakukan melalui 5 pilar, aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal yang lebih bebas. Langkah ini kemudian tidak terhenti disitu saja. Selanjutnya, di 2006 dilakukan formulasi blue print yang berisi target waktu penyampaian MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dengan jelas. Yang pada akhirnya tercapailah kesepakatan bersama untuk mencapai target tersebut. Pada 20 November 2007 para kepala negara ASEAN menandatangani Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Dokumen tersebut berisi komitmen negara anggota atas keseriusan pencapaian MEA dimana evaluasi

pencapaian MEA akan dilakukan melalui serangkaian indikator kinerja yang disepakati dan diumumkan kemasyarakat luas².

Meskipun pada awalnya ASEAN itu tidak sama dengan kelompok kerja sama regional yang lainnya pada negara berkembang lain. Mulai dari fase awal ketika ASEAN memulai kerja sama ekonominya pada 1976 dan 1979, mengacu pada pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi sejak awal 1980an, kerjasama ASEAN tidak begitu signifikan. Meskipun begitu negara- negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regiona baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Association of Southeast Asia (ASA)*, *Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO)*, *Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO)*, *South East Asia Treaty Organization (SEATO)* dan *Asia and Pacific Council (ASPAC)*.

Salah satu wujud gerakan ASEAN untuk menjalin hubungan dengan negara-negara di Asia Timur adalah dengan membentuk ASEAN +3. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam Jepang, China dan Korea semakin bersatu secara berkala. Dengan adanya investasi yang sangat besar oleh Jepang, Korea di China, sehingga secara bertahap China menjadi mitra dagang Jepang yang terbesar. Sementara itu Korea Selatan semakin memimpin pasar eksportnya. Hal ini yang membuat ASEAN tertinggal dan kemudian membentuk ASEAN +3.

Bagi negara- negara di Asia timur sendiri, timbulnya regionalisme di Asia Timur tentu saja merupakan usaha baru yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah tersebut dalam peningkatan ekonomi mereka dalam rangka menghadapi peningkatan globalisasi ekonomi dan ketidak pastian dalam berbagai bentuk hubungan multilateral. Bentuk regionalisme di Asia Timur endiri meskipun sudah bergabung dengan ikatan penyatuan kerjasama perdagangan dunia atau World Trade Organization, tetap berhati-hati dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya diluar wilayah. Mungkin itulah sebabnya mengapa negara-negara Asia Timur tidak sama halnya dengan negara-negara Asia Tenggara yang secara solid membangun kerjasama dalam satu kawasan. Negara-negara Asia Timur lebih dikenal tidak pernah membentuk organisasi sendiri.

² Arifin, Sjamsul. (2008). *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:Memperkuat Sinergi ASEAN Ditengah Kompetisi Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. hal. 1-7

Salah satu negara yang besar dan berpengaruh dalam perekonomian Asia Timur adalah China. Dalam bukunya, Djafar mengungkapkan bahwa terdapat dua kunci kesuksesan dari pasar China, yaitu:

1. Bangunan politik yang kuat terutama terbentuknya peran negara sebagai pengatur terdepan.
2. Peran negara yang maksimal yang menentukan dan amat penting untuk menggerakkan perekonomian China yang menghadapi banyak tantangan³

Banyak strategi China dalam pembentukan pasarnya⁴ baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Keberhasilan China dinilai bukan merupakan suatu hal yang instant. Negara ini tadinya merupakan negara dimana kemiskinan menjadi masalah utamanya mulai menduduki terpenting dalam setiap kerja sama ekonomi internasional.

Integrasi ekonomi telah menarik perhatian banyak negara terutama setelah Perang Dunia II dan menjadi semakin penting sejak 1990-an. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah kesepakatan untuk mewujudkan kerangka kerjasama regional (*regional arrangement*) dan juga bertambahnya jumlah negara yang menjadi anggota dari kerangka kerjasama itu. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa pertimbangan politik memainkan peran penting dalam menciptakan berbagai kerjasama regional tersebut. Meski demikian ada juga yang menyatakan pertimbangan ekonomi sangat mempengaruhi upaya-upaya untuk mewujudkan kerjasama regional tersebut⁵.

Kerangka integrasi ekonomi dapat dicapai dengan berbagai tingkatan. Salah satunya adalah melalui kerja sama inter-regional⁶. Salah satu contohnya adalah kegiatan-kegiatan yang tengah dilakukan oleh ASEAN dan Asia Timur. Menurut Suthipand Chirathivat, ASEAN telah mengambil inisiatif untuk

³ Djafar, Zainuddin. (2008) *Indonesia, Asean dan Dinamika Asia Timur: Kajian Perspektif Ekonomi-Politik*, Jakarta: Pustaka Jaya. hal. 114.

⁴ *Ibid*, hal. 65-117.

⁵ Arifin, Sjamsul. (2008) *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN Ditengah Kompetisi Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. hal. 23

⁶ Menurut Sjamsul Hadi selain tingkat Regional terdapat tingkatan lainnya yaitu:....., integrasi ekonomi dilakukan dalam berbagai tingkatan, dari tingkat multilateral, regional, intra-regional, plurilateral maupun bilateral

mewujudkan inter-regional itu⁷. Salah satu yang telah dilakukan ASEAN adalah dengan membentuk mekanisme ASEAN+3. Tampaknya yang mendorong ASEAN untuk menciptakan mekanisme tersebut adalah pertumbuhan kekuatan ekonomi yang semakin besar dan terintegrasi dari Jepang, China dan Korea.

Laporan yang berjudul *East Asian Vision Group Report, "Towards An East Asian Community, Region of Peace, Prosperity and Progress"* menguraikan visi dari pembentukan komunitas Asia Timur. Visinya adalah: (1) menciptakan perdamaian, kesejahteraan dan kemajuan yang didasari oleh perkembangan yang penuh terhadap masyarakat di kawasannya serta memberikan kontribusi positif untuk dunia; (2) mempromosikan perdagangan; dan (3) mempromosikan kerja sama finansial. Laporan itu lebih jauh menyatakan ada tiga alasan tambahan mengapa perlu dibentuk komunitas Asia Timur itu. Ketiga alasan tersebut adalah: (1) Asia Timur sendiri telah menjadi kawasan yang paling penting di dunia; (2) kesamaan letak geografis, sejarah yang hampir sama dan kesamaan norma budaya dan nilai; (3) karena adanya globalisasi di dunia ekonomi, membuat negara anggota sama-sama saling membutuhkan guna memenuhi kebutuhan standar global, menyamakan negosiasi dan menyatukan negosiasi untuk perdagangan multilateral; (4) peristiwa krisis finansial yang pernah terjadi di Asia memberikan untuk menghindari kegagalan yang sama; (5) menghindari perang karena adanya persaingan dan permusuhan antara negara Asia Timur; (6) menjadi inspirasi bagi negara anggota Asia Timur agar dapat meningkatkan kerjasama yang mengacu pada dasar-dasar kesepakatan Komunitas Asia Timur; (7) pada akhirnya pembentukan Komunitas Asia Timur secara garis besar bertujuan untuk : menghindari konflik dan mempromosikan perdamaian antar negara Asia Timur, meningkatkan perdagangan, keuangan, perkembangan dan kawasan, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan yaitu dengan memfasilitasi usaha dari kawasan untuk perlindungan lingkungan dan pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan dengan menambah kerjasama baik dalam cakupan pendidikan maupun sumber daya manusia; dan mempertahankan identitas

⁷ Dikutip dari Suthipand Chirathivat. *ASEAN's Role and Interests in the Formation of East Asian Regionalism*, dipresentasikan pada workshop *Integration in Asia and Europe: historical Dynamics, Political Issues and Economic Perspectives*, University of Wuppertal, December 3-5, 2004, hal. 101.

Komunitas Asia Timur dgn mengadakan pertukaran dan dialog baik dalam tingkatan pemerintahan maupun non pemerintahan.

Terkait dengan tujuan dari pembentukan kerjasama tersebut, dalam laporannya East Asia Vision Group (EAVG) melaporkan bahwa kerjasama yang ditawarkan EAVG sangat luas yaitu sebanyak 57 butir seluruh butir rekomendasi tersebut dikelompokkan kedalam 6 agenda kerjasama yaitu: (1) Bidang Ekonomi; (2) Finansial;(3) Politik dan Keamanan;(4) Lingkungan Hidup dan Energi; (5) Sosial, Kultural dan Pendidikan dan (6) Kerjasama Kelembagaan.⁸

Salah satu substansi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada rekomendasi kerjasama dibidang Politik dan Keamanan yang salah satunya adalah membentuk think-tanks untuk menggali isu-isu jangka panjang yang sangat strategis. Landasan pemikiran terhadap rekomendasi pembentukan think-tanks tersebut didasari untuk menghadapi ancaman-ancaman internasional serta masalah keamanan regional. Maka upaya dari pembuatan think-tank terbentuklah Network of East Asian Think-tanks yang beranggotakan 13 perwakilan dari negara anggota⁹.

Pada awalnya ide membentuk Network of East Asian Think-tanks (yang kemudian disebut NEAT) muncul pada pertemuan “10+3” Summit. Pada pertemuan tersebut dibahas bahwa kerja sama Asia Timur membutuhkan sebuah wadah atau institusi yang mampu menjadi jaringan think-tank atau bentuk diplomasi *second track* bagi sesama negara anggota Asia Timur. Secara spesifiknya, jaringan ini yang juga diharapkan mampu mempelajari isu-isu penting yang berkaitan dengan kerja sama Asia Timur. Selain hal tersebut jaringan tersebut diharapkan mampu memberikan usulan-usulan strategis mengenai kebijakan terkait dengan kerjasama antar kawasan serta pengadaan penelitian dan laporan-laporan yang harus dilaporkan pada setiap pertemuan “10+3” Summit¹⁰.

Berkaitan dengan usulan tersebut diatas lalu pada 2002, maka pada East Asia Study Group dibentuklah Network of East Asia Think-tanks (NEAT).

⁸ East Asia Vision Group. (2001). *Towards an East Asian Community: Region of Peace, Prosperity and Progress*. East Asia Vision Group Report.

⁹ Negara anggota NEAT adalah Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Jepang, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore, Thailand dan Vietnam.

¹⁰ NEAT . 2004.. Februari 2010 http://www.neat.org.cn/english/zjdyen/index.php?topic_id=001001

Selanjutnya secara resmi NEAT mengadakan kongres pertama yang diadakan di Beijing pada 29 September 2003. tiga topic utama yang dibahas adalah “Towards East Asia Cooperation”, “Important Steps Leading to East Asia Cooperation” and “Key Areas in East Asia Cooperation”. Hasil pertemuan tersebut kemudian di terbitkan dan dimuat dalam situs resmi NEAT yaitu www.neat.org.

Secara resmi di gagas pada pertemuan “10+3” Summit, NEAT merupakan sebuah mekanisme untuk penelitian dan pertukaran antar akademis. Selain itu NEAT juga sebagai think-tanks antar Negara-negara Asia Timur. NEAT diidentifikasi sebagai *second track* daripada East Asia Cooperation. Salah satu tugas dari wadah ini adalah untuk menyediakan dukungan intelektual dan rekomendasi kebijakan pada isu-isu penting dan sebagai arah bagi East Asia Cooperation.

I.2 PERMASALAHAN

Dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas sampailah kepada pertanyaan dari penelitian ini yaitu dilihat dari interaksi setiap negara anggota komunitas Asia Timur melalui NEAT, **bagaimanakah interaksi antar negara dalam proses institusionalisme NEAT sebagai *think-tank* pada kerjasama Asia Timur?serta bagaimanakah signifikansinya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh kerjasama APT?**

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai pergerakan Asia Timur khususnya interaksi antar negara anggotanya dilihat melalui NEAT sebagai *secondtrack* dari kerja sama Asia Timur. setelah jawaban dari tujuan penelitian ini didapat maka dari analisis data diharapkan penelitian ini juga mampu memberikan deskripsi mengenai sejauh manakah upaya negara anggota Asia Timur menginstitusionalisasikan NEAT sejauh ini.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu selain memberikan kontribusi dalam ilmu Hubungan Internasional khususnya dibidang diplomasi dan kerjasama regional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan rekomendasi terhadap kerjasama Asia Timur khususnya dalam diplomasi *secondtrack*.

I.4 KAJIAN PUSTAKA

Melalui kajian pustaka, penulis akan menelusuri beberapa penelitian dan tulisan sebelumnya yang terkait dengan NEAT sebagai *secondtrack* yang merupakan satu usaha pembentukan institusi internasional melalui kerja sama Asia Timur. Menurut Kim (2001), diplomasi yang dilakukan oleh negara (*states*) tidak selalu dilakukan oleh pemerintah ke pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh kerja sama Asia Timur, proses diplomasi itu juga melibatkan Track Two (T2) yang dikenal sebagai “*private-citizen diplomacy*”¹¹. Selanjutnya, Kim juga berpendapat bahwa T2 melanjutkan setiap dialog-dialog kawasan dan mengembangkannya untuk dialamatkan kepada pemerintah dengan tujuan membantu pemerintah membuat keputusan atau kebijakan yang terkait dari isu ekonomi hingga penciptaan perdamaian dan pencegahan konflik.

Mursitama (2009) berpendapat bahwa NEAT sebagai *secondtrack* harus memiliki struktur yang jelas yaitu *chairmanship*, mekanisme dan *funding issues*. Menurut Mursitama, NEAT memiliki pertemuan rutin antar koordinator negara (Country Coordinator Meeting/CCM). Pertemuan tersebut diadakan setiap tahun dua kali. Selain CCM, Working Group (WG) juga merupakan aspek yang penting. Setiap negara diizinkan untuk mengadakan WG. Sebelum WG diadakan, setiap coordinator dari negara tersebut harus mengajukan proposal terlebih dahulu ke CCM untuk kemudian mendapatkan persetujuan. Apabila WG telah dilaksanakan, hasilnya harus diformulasikan atau diumumkan melalui CCM. Aspek yang ketiga adalah Annual Conference (AC). Konferensi ini secara berkala diadakan setiap setelah pertemuan kedua CCM setiap tahunnya. Tujuan dari diadakannya AC yaitu untuk memberitakan atau mengumumkan hasil dari setiap WG kepada forum umum secara terbuka. Karena sifatnya umum dan terbuka, maka pertemuan AC ini tidak hanya dihadiri oleh anggota NEAT saja melainkan juga termasuk *decision maker*, kalangan academia, media dan elemen sipil.

NEAT memegang peranan sebagai *secondtrack* pada kerjasama Asia Timur. NEAT sangat berpengaruh dalam setiap perumusan kebijakan. Selain itu,

¹¹ Phar, Kim Beng. (2001). *Track Two Discussion and Regionalism*. 1.

NEAT juga mampu memberikan masukan atau *feedback* terhadap instansi pemerintahan serta memberikan *assessment* baik dalam bidang ekonomi maupun sosial dan yang lainnya.

I.5 KERANGKA TEORI

I.5.1 Integrasi Ekonomi

Pada era globalisasi seperti ini kepentingan dan pengaruh integrasi ekonomi terhadap peningkatan kemakmuran sudah dipahami oleh banyak pihak. Sejalan dengan itu, integrasi ekonomi telah menjadi elemen penting dalam proses pengambilan kebijakan pada tingkat internasional¹².

Integrasi ekonomi sendiri menurut Jovanovic adalah suatu kombinasi atau penyatuan beberapa perusahaan dalam suatu industri baik secara vertikal maupun horizontal¹³. Namun menurut Veseth, integrasi ekonomi merupakan suatu proses dimana sekelompok negara-bangsa setuju untuk mengenyampingkan batasan nasionalitasnya semata-mata untuk mencapai tujuan ekonominya. Selain itu hal tersebut dilakukan untuk menciptakan pasar yang lebih luas dan mengikat dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya¹⁴. Menurutnya terdapat beberapa tahapan dalam integrasi ekonomi yang bisa dicapai oleh bangsa-bangsa¹⁵. Namun apapun tahapan yang mereka gunakan pada dasarnya sekelompok negara yang melakukan integrasi ekonomi bertujuan untuk mencapai efisiensi yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi¹⁶.

Balassa membedakan integrasi sebagai konsep dinamis melalui penghapusan diskriminasi diantara negara yang berbeda, maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi¹⁷. Sementara Holzman mengatakan integrasi ekonomi merupakan situasi dimana dua kawasan menjadi

¹² Arifin, Sjamsul. (2008)*Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:Memperkuat Sinergi ASEAN Ditengah Kompetisi Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 24

¹³ *Ibid*, 25

¹⁴ Veseth , Michael. 1996) *Introduction to International Political Economy*. United States of America: Prentice-Hall, Inc. 219.

¹⁵ Menurut Veseth tahapan-tahapan tersebut adalah Free Trade Area, Custom Union dan Economic Union. *Ibid*, hal. 219-220.

¹⁶ *Ibid*, hal. 221

¹⁷ Bela ,Balassa. (1976)*Types of Economic Integration, World Bank Reprint Series*. Washington, D.C. 29.

satu atau mempunyai satu pasar yang ditandai harga barang yang factor produksinya sama diantara dua kawasan tersebut¹⁸.

Namun terlihat jelas memang tidak ada satu definisipun yang baku tentang integrasi ekonomi. Para ekonom hingga kini terus mengembangkan berbagai definisi mengenai integrasi ekonomi dari berbagai sudut pandang yang berbeda satu sama lain¹⁹. Dari berbagai macam definisi diatas mengenai integrasi ekonomi, Jovanovic menyarikan bahwa integrasi ekonomi merupakan hal yang sangat kompleks dan harus berhati-hati dalam mendefinisikannya. Ia juga mengatakan integrasi ekonomi merupakan upaya dari sekelompok negara dalam meningkatkan tingkat kemakmurannya.

Salah satu pendekatan lainnya yang berpendapat mengenai integrasi ekonomi yaitu strukturalis. Ketika North American Free Trade (NAFTA) terbentuk, ada suatu gerakan yang menamai dirinya “Chiapas Awakening”. Gerakan tersebut meskipun tidak pada posisi marxis seutuhnya namun juga tidak pada golongan liberal maupun merkantilis. Gerakan ini sangat berseberangan dengan konsep NAFTA yang meyakini akan menambah perekonomian dan kemakmuran negara melalui konsep kapitalis. Terdapat dua pergerakan yang disuarakan Chiapas Awakening, yaitu melawan penekanan terhadap pasar dan kekuatan kolektif negara. Apa yang disuarakan oleh gerakan ini dikatakan Veseth sebagai refleksi prespektif ketiga dalam ekonomi politik internasional yaitu pendekatan strukturalis²⁰.

Hampir sejalan dengan strukturalis, yang dijalankan oleh Chiapas Awakening, impereal Lenin mengatakan berpendapat bahwa kapitalisme telah merubah kepentingan internal menjadi eksploitasi internasional dan bagaimana ketidak seimbangan diantara kelas terjadi. Bagi Lenin, usaha para kapitalis dalam pencarian untung dalam integrasi ekonomi tidk dapat begitu saja diamini sebagai usaha untuk meningkatkan standar hidup kaum proletar²¹. Ini berarti dapat diasumsikan bahwa ada kepentingan lain yang dibela oleh negara melalui integrasi ekonomi tersebut.

¹⁸ *Loc cit*, Sjamsul Arifin. hal. 25

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Loc cit*, Michael Veseth. hal. 61

²¹ *Ibid*, hal. 68.

Sama halnya dengan Lenin, Ennest Mendel memandang ekonomi politik internasional dalam ranah integrasi ekonomi, semata-mata hanyalah usaha para kapitalis untuk meraih keuntungan yang lebih besar dan mampu meningkatkan skala akumulasi²².

I.5.2 Institusi Internasional

Neorealis memandang bahwa negara merupakan suatu kesatuan dari berbagai aktor yang berada pada satu wilayah yang telah diberi batas tertentu²³. Artinya tidak ada istilah hubungan antar negara dalam pandangan Neorealis. Didalam Neorealis segala bentuk wujud interaksi dalam sebuah system haruslah bersifat domestik²⁴. Munculnya actor transnasional adalah apabila ada otoritas politik yang mengeluarkan keputusan. Apabila otoritas politik tidak ada dan terjadi situasi yang anarkis maka munculah actor transnasional²⁵. Bagi Neorealis adanya kebijakan luar negeri dari suatu negara adalah tergantung dari *power* yang dimiliki negara tersebut dalam sebuah sistem²⁶. "*Power*" dalam Neorealis mempengaruhi hubungan internasional kedalam beberapa aspek terhadap sebuah institusi internasional. Actor yang memiliki *power* lebih kuat akan sangat mempengaruhi lingkungan institusi tersebut. Actor dalam hal ini adalah negara (*state*). Negara dalam hal ini termasuk pemerintah, masyarakat sipil dan badan milik pemerintah. *Hal* ini berarti faktor *power* dari sebuah negara menentukan kebijakan luar negeri dan akan berpengaruh dengan negara lain. Semakin besar *power* yang dimiliki oleh sebuah negara maka akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap negara lain didalam sebuah institusi.

Sebenarnya bagi Neorealis konsep institusi sendiri sangat jauh berbeda dengan ideologi *Realis* dan *Neo-realis*. Hal tersebut karena didalam institusi bukanlah kepentingan "*Power*" yang menjadi landasan namun sebuah institusi internasional lebih mengedepankan kepentingan dari institusi itu tersendiri.

²² *Loc cit*

²³ Krasner, Stephen.D. (1995). *Power politics, institutions, and transnational relations*. Bringing transnational relations back in. New York:Cambridge University Press. 257

²⁴ *ibid*

²⁵ *ibid*

²⁶ *Ibid*

Bertolak belakang dengan Neorealis yang berbicara sedikit mengenai hubungan transnasional, Neoliberal justru sangat memanfaatkan transnasional itu sendiri. Bagi Neoliberal hubungan transnasional biasanya dimanfaatkan oleh negara-negara yang lebih besar atau *power* untuk memaksakan kepentingannya melalui sebuah *institutional arrangement*. *Institutional arrangement* inilah yang menjadi kepentingan tersendiri bagi negara-negara yang memiliki *power* untuk bergabung dengan negara lemah. Kepentingan tersebut adalah karena berarti negara yang memiliki *power* tersebut mampu membuat negara lain terikat dalam sebuah komitmen. Ikatan ini biasanya berjangka waktu cukup panjang. Hal tersebut berarti menghemat sumber daya negara besar “*power*” tersebut karena tidak perlu lagi menyampaikan kepentingannya secara *G to G* dengan negara yang dituju. Hal berikutnya yang menarik negara “*power*” untuk ikut kedalam sebuah institusi internasional adalah karena adanya derajat keeratan. Derajat keeratan ini adalah apabila didalam institusi internasional tersebut ada sebuah negara “*power*” mengalami penurunan *power*. Maka institusi akan tetap memperpanjang dan melindungi *power* negara tersebut²⁷.

I.5.3 Institusi internasional modern

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan serta sistem politik di beberapa negara kedua paradigma mengenai institusi internasional diatas mengalami perkembangan. Ruggie mengatakan bahwa keduanya tidak banyak menawarkan sistem yang transformatif²⁸. Neoliberal hanya menawarkan pola pikir yang reproduktif namun tidak transformatif bagi institusionalisme. Sementara Neorealis karena berdasarkan pada *state power* maka hanya menanggapi setiap proses institusionalisme dengan tuntutan bukanya bertransformasi²⁹.

Sementara itu hampir sama dengan cara pandang Neorealis tetapi juga menyerap sistem Neoliberal, Ikenberry menjabarkan model institusionalisme pada masa kini. Menurut Ikenberry bergabungnya negara kedalam sebuah institusi

²⁷ Ikenberry, G. John. (2003). *State Power and the Institutional Bargain: America's Ambivalent Economic and Security Multilateralism*. US Hegemony and International Organizations. New York: Cambridge University Press 52

²⁸ Ruggie, John Gerrard. (2003). *Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization* (2nd ed.). London: Routledge. 25

²⁹ *ibid*

internasional adalah karena melalui institusi internasional dapat tercipta kondisi yang stabil dan kondusif³⁰. Dengan situasi seperti itu sebuah institusi akan dimanfaatkan oleh negara kuat untuk memaksakan kepentingannya³¹.

Lalu mengapa negara lemah mau bergabung dengan negara kuat didalam sebuah institusi dan membiarkan negara kuat memaksakan kepentingannya? bagi negara lemah sebuah institusi memiliki batasan dan pengawasan terhadap setiap perilaku negara kuat. Hal tersebut yang membawa negara lemah kedalam sebuah institusi internasional. Karena negara lemah akan menjadi subyek dari kekuasaan negara kuat apabila mereka bergabung kedalam non-institusi. Didalam badan non-institusi tidak ada pengawasan dan batasan terhadap negara kuat³².

Model institusi modern setelah neoutilitarian, Ruggie (2003) berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) tahap pembentukan institusi internasional yaitu; (1) Epistemic Communities; (2) International Regimes; dan (3) Formal International Organizations³³.

- (1) Epistemic Communities merupakan aspek yang dibutuhkan dalam proses institusionalisasi. Menurut Ruggie, sebuah proses institusionalisasi tidak selalu hanya membutuhkan jaringan organisasi saja namun juga membutuhkan sudut pandang dari ranah ilmu yang mampu memberikan gambaran hubungan politik.
- (2) International Regimes, pada tahap ini tahap institusionalisasi telah mencapai proses dimana telah adanya misi bersama, pembagian peranan, aturan-aturan main, visi organisasi, rancangan keuangan, dan energi yang telah disepakati oleh sekelompok negara-negara.
- (3) International Organization (IO) merupakan tahap yang terpenting dari ketiga tahap yang ada. Ruang lingkup dari tugas mereka adalah pada *international regime*. Singkatnya, tahapan IO merupakan bentuk dimana bermacam-macam kebijakan berada didalamnya dengan tujuan untuk kepentingan *international regime* yang membentuknya.

³⁰ *Loc cit.* Ikenberry, 51

³¹ *ibid*

³² *Ibid*

³³ *loc cit.* Ruggie, 55

I.5.3.1 Epistemic Community

Haas, 1992, berpendapat bahwa Epistemic Community adalah sebuah jaringan yang didalamnya terdapat para ahli dan kaum profesional yang menguasai dan memiliki keahlian dalam pemahaman kebijakan luar negeri³⁴. Didalam Epistemic Community mereka memiliki³⁵ persamaan prinsip dan norma yang secara rasional memiliki dasar nilai bagi suatu aksi sosial dalam anggota komunitas. Persamaan berikutnya yang dimiliki anggota Epistemic Community ini adalah keyakinan akan adanya sebab musabab. Keyakinan ini muncul karena adanya penelitian mengenai beberapa masalah. Lalu penelitian tersebut menguraikan bahwa keterkaitan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lainnya akan memunculkan perilaku yang diharapkan. Persamaan berikutnya adalah adanya rasa praduga untuk mencari kebenaran dan menimbang kebenaran-kebenaran yang masih dalam keahlian mereka tersebut. Hal terakhir yang dimiliki oleh sebuah Epistemic Community adalah adanya usaha untuk membuat sebuah rancangan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat³⁶.

Secara praktis dari penjabaran mengenai Epistemic Community diatas, berarti Epistemic Community dapat secara langsung berhubungan dengan para penentu kebijakan (*decision maker*)³⁷. Epistemic Community dapat mempengaruhi kepentingan negara dengan cara mengajukan rekomendasi kebijakan yang mereka susun kepada para penentu kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang mereka ajukan kemudian dijabarkan dan diperjelas dimensinya yang menonjol. Lalu dari rekomendasi tersebut para pembuat kebijakan kemudian akan menarik kesimpulan dan menyebarkan kenegara lain. Tahap selanjutnya kemudian salah satu negara akan mempengaruhi kepentingan mereka terhadap negara lain. Selanjutnya akan memunculkan perilaku dari setiap negara dan akan terjadi pertemuan antar kebijakan dan reaksi setiap negara.

Haas mengungkapkan bahwa Epistemic Community menawarkan alternatif lain dalam merumuskan kebijakan. Karena menurut pandangan Epistemic Community apabila proses perumusan kebijakan tersebut hanya

³⁴ Haas, Peter.M. (1992). *Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination*. Journal of International Organization. 3.

³⁵ Sundstorm menyebutnya dengan istilah “memiliki”, lihat Sundstorm hal. 5

³⁶ *Loc cit*

³⁷ *Loc cit*

ditangani oleh penentu kebijakan saja maka akan panjang dan bertele-tele. Epistemic Community berusaha untuk memberikan cara yang lebih dinamis namun konsisten. Tabel berikut menggambarkan pola pendekatan yang dipakai oleh Epistemic Community dibandingkan dengan mode pendekatan yang lainnya.

Tabel 1.1
Approaches to the study of policy change

Model pendekatan	Wilayah analisis	Faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan	Mekanisme dan dampak perubahan kebijakan	Aktor utama
<i>Epistemic Community</i>	Transnasional; perangkat administrasi negara dan institusi internasional	Pengetahuan ;sebab akibat	Penyebaran informasi dan pembelajaran	Epistemic Community; <i>individual states</i>
<i>Neorealis</i>	Internasional; negara dalam sistem ekonomi dan politik	Penyaluran harga dan keuntungan	Perang; tergantung dari situasi <i>power</i> negara saat itu	Negara (<i>states</i>)
<i>Teori Dependensi</i>	Internasional;sistem global	Perbandingan antar negara dengan mengawasi sumber daya ekonominya	Perubahan produksi	Negara <i>core</i> , <i>periphery</i> dan <i>semiperiphery</i>
<i>Poststructuralist</i>	Internasional;percakapan dan bahasa	Penggunaan dan makna kata	Percakapan	Tidak jelas

Sumber: Haas, Peter.M. (1992). *Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination*. Journal of International Organization.

Terminologi Epistemic Community yang digunakan oleh Haas sebenarnya berada pada level yang lebih rendah daripada Epistemic Community yang dipakai oleh Ruggie. Haas mengungkapkan bahwa Epistemic Community yang dipakainya bertujuan untuk menunjuk kepada sekelompok kecil individu-individu yang memiliki cara pandang yang sama dan juga keempat sifat yang sama seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Bentuk pengetahuan (*episteme*) yang ada pada kelompok ini merupakan bentuk dari penyerapan Epistemic Community kedalam

institusi pemerintah yang kemudian menjadi dasar ditengah-tengah masyarakat dan menjadi bentuk konstruksi yang sebenar-benarnya.

Haas kemudian menambahkan bahwa cara pandang dari sebuah Epistemic Community adalah murni. Murni yang berarti tidak ada bentuk rekayasa dan paksaan dari aspek luar. Hal tersebut karena Epistemic Community murni meneliti kondisi sosial dan politik. Selain itu Epistemic Community memegang teguh prinsip keyakinan akan adanya sebab akibat yang kemudian merefleksikan pandangan-pandangan politik atau kebijakan. Oleh karena itu setiap ide yang diajukan dari Epistemic Community tidak lahir secara instan dan menduga-duga melainkan melalui proses penelitian yang riil. Selain itu juga melalui proses validasi yang akhirnya disimpulkan bentuk kebijakan yang layak untuk isu-isu terkait.

Sundstorm³⁸ menyatakan bahwa Epistemic Community merupakan konsep dimana ketika *decision makers* harus menghadapi terlalu banyak macam arus daripada isu dan tidak mampu menghadapinya, maka dibutuhkanlah sesuatu yang mampu membantu. Bantuan tersebut harus mampu menyusun dan memperkecil isu-isu yang terlalu banyak tersebut. Aktor yang kemudian menjadi “penerjemah” dari isu-isu tersebut kemudian tidak hanya memberikan informasi saja namun dapat mengarahkan *decision maker* dalam mengambil kebijakan. Dengan semakin berkembangnya isu-isu yang datang dari berbagai ranah, maka aktor tersebut ditambahkan sehingga didalam komunitas Epistemic Community terdapat aktor-aktor yang berlatar belakang berbeda-beda.

I.5.3.2 International Organization

Sementara itu menurut Feld dalam mempelajari organisasi internasional terdapat beberapa pendekatan³⁹. Pendekatan pertama adalah pendekatan sejarah. Pendekatan ini merupakan salah satu yang penting karena dengan melihat sejarahnya sebuah institusi internasional maka dapat diukur tingkat keberhasilan maupun kegagalannya. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan normatif. Melalui pendekatan ini sebuah organisasi internasional dilihat organ birokrasi dan organ

³⁸ *loc cit.* Sundstorm. 4.

³⁹ Feld, Werner. J., & Jordan, Robert. S. (1983). *International Organizations: A Comparative Approach*. New York: Praeger. 2-3

lainnya bekerja terhadap anggotanya. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan melalui fungsi struktur. Pendekatan ini mengamati bagaimana organisasi internasional tersebut menjalankan fungsinya secara formal dan informal. Secara formal berarti legal dan informal berarti secara politik. Model pendekatan yang terakhir adalah melalui analisa kebijakan.

Selanjutnya adalah mengenai ciri khas dari sebuah organisasi internasional. Menurut Feld, terdapat beberapa ciri khas yang harus dimiliki sebuah organisasi internasional. Ciri khas yang pertama adalah bahwa sebuah organisasi internasional memiliki satu tujuan yang sama untuk kepentingan setiap anggotanya. Meskipun dalam sebuah organisasi internasional tidak semua anggotanya memiliki kepentingan yang sama. Ciri khas berikutnya adalah didalam sebuah organisasi internasional terdapat kerangka kerja (*framework*) yang dimiliki oleh sebuah institusi. Kerangka kerja ini bisa dalam bentuk yang sangat sederhana atau yang besar. Bentuk kerangka kerja sederhana adalah seperti misalnya hanya memiliki sekretariat lengkap dengan staffnya. Sementara bentuk kerangka yang besar adalah apabila organisasi internasional tersebut sudah memiliki lembaga legislatif, eksekutif dan beberapa kantor cabang yudisial di setiap negara anggota organisasi internasional tersebut. Ciri khas selanjutnya adalah setiap organisasi internasional selalu mengadakan perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini kerap dihasilkan melalui sebuah konvensi tahunan, *charter* ataupun konstitusi, selanjutnya adalah organisasi internasional tersebut memiliki "*international legal personality*". Ini artinya sebuah organisasi internasional dapat bertindak atau bersikap sama seperti sebuah negara namun tetap dibawah hukum internasional⁴⁰.

I.5.3.3 International Regime

International Regime pada dasarnya yaitu menangani kerjasama internasional untuk satu tujuan saja. Sebuah International Regime bisa berbentuk formal, informal, global dan regional. Feld mencontohkan sebuah International Regime seperti perjanjian internasional Brettonwoods. Sementara itu contoh International Regime yang informal adalah ketika International Regime tersebut

⁴⁰ *ibid*

tidak memiliki struktur yang lengkap. Selanjutnya contoh International Regime global adalah perjanjian perlindungan perikanan Brettonwoods. Sementara contoh International Regime regional adalah seperti European Monetary System (EMS)⁴¹.

Mengutip Keohane, Feld mengungkapkan bahwa sebuah International Regime ditujukan bagi seperangkat regulasi dan kontrol pemerintah antar negara. Setiap pemerintahan ini bekerjasama membuat perjanjian untuk satu tujuan tertentu.

I.6 ASUMSI

Second track merupakan merupakan wujud lain dari institusi internasional yang berfungsi sebagai pengarah atau pemberi saran bagi pembuat kebijakan (*decision maker*) dalam hal ini adalah track one. Aktor dari *secondtrack* berasal dari kalangan akademisi. Dalam upaya merancang suatu kebijakan dalam suatu kerja sama internasional, setiap negara anggota memiliki perwakilannya masing-masing untuk menjadi *secondtrack*. Secara epistemologis, interaksi setiap negara dapat mengukur sejauh mana *secondtrack* berperan sebagai institusi internasional.

I.7 HIPOTESIS

Sebagai *secondtrack*, NEAT memiliki peran dalam penentu kebijakan dalam kerja sama Asia Timur. Interaksi negara-negara anggota NEAT berhasil mewujudkan proses institusionalisasi kerjasama Asia Timur.

I.8 METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu berdasarkan dokumen-dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh pertemuan Asia Timur dan NEAT. Jenis metode penelitian dokumentasi seperti ini pada umumnya akan sepenuhnya berfokus kepada laporan-laporan dan informasi resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau agen internasional⁴². Karena itu penelitian ini akan menggunakan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Asia Timur dan NEAT. Namun selain itu, model metode penelitian dokumen memiliki

⁴¹ *Ibid*, 39

⁴²Neuman, W. Lawrence. (2000). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches* (4th ed.). United States of America. 302

keterbatasan untuk menjelaskan setiap rinci proses dari kerjasama dari setiap negara. Karena itu, penjelasan yang lebih terperinci mungkin akan didapatkan melalui metode wawancara dan studi literatur.

Adapun pola pengolahan dokumen yang dilakukan nanti yaitu; (1) penulis akan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Asia Timur dan NEAT; (2) mengkategorikan berdasarkan setiap pertemuan NEAT; (3) mengklasifikasikan setiap hasil dari pertemuan NEAT; dan (4) menarik kesimpulan bagaimana pergerakan negara anggota NEAT dalam menginstitutionalisasi NEAT melalui setiap interaksi dalam NEAT.

I.9 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab 1: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, asumsi, hipotesis dan metodologi penelitian.

Bab 2: Analisa mengenai NEAT sebagai *secondtrack* dalam kerja sama Asia Timur.

Bab 3: Penjelasan umum mengenai interaksi negara-negara anggota NEAT dalam proses institusionalisasi kerja sama Asia Timur.

Bab 4: Penutup dan kesimpulan .

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala anugerah dan kasihNya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya menyadari dalam proses penyusunan tesis ini akan terasa sangat sulit tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tirta. N. Mursitama, Ph.D selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih atas kesediaanya yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran.
2. Dr. Makmur Keliat selaku ketua program pasca sarjana Ilmu Hubungan Internasional sekaligus penguji ahli sidang tesis. Prof. Zainuddin Djafar, Ph. D selaku ketua sidang tesis dan Utaryo Santiko, S. Sos, M. Si selaku sekretaris sidang.
3. Jean Guy Noel TARIN, thank you for teaching me how to overcome all the pressure by doing Qi Gong.
4. Anandarta Immanuel Agatta anak lelakiku, terimakasih nak untuk nafasmu, binar matamu dan semangat mu.
5. Ny. Timbul Pandjaitan ibu penulis, terimakasih untuk doanya dan kebesaran hatinya. Sian Ho Litra Pandjaitan adik penulis.
6. Ronal dan keluarga Sibarani di Duren Sawit, keluarga August Melaz.
7. Pak Udin, mas Adi, mbak Iche Namira dan mbak Lina yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dalam segala aspek.

Akhir kata, besar harapan penulis agar hasil penelitian ini dapat berguna untuk menyumbangkan pengetahuan serta dapat menjadi dorongan agar dapat dilakukan penelitian lain yang terkait.

Jakarta, 1 Juli 2010

Arthanami E K Pandjaitan

ABSTRAK

Nama : Arthanami Eka Krisima Pandjaitan
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : **Proses Institusionalisasi *Network of East Asian Think-tanks* (NEAT) Pada Kerjasama ASEAN Plus Three: 2006-2008**

Permasalahan pada penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah interaksi antar negara dalam proses institusionalisme NEAT sebagai *think-tank* pada kerjasama Asia Timur? Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai pergerakan Asia Timur khususnya interaksi antar negara anggotanya dilihat melalui NEAT sebagai *secondtrack* dari kerjasama Asia Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu berdasarkan dokumen-dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh pertemuan Asia Timur dan NEAT. Jenis metode penelitian dokumentasi seperti ini pada umumnya akan sepenuhnya berfokus kepada laporan-laporan dan informasi resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau agen internasional. Dari analisa tersebut dapat terlihat ciri khas dari sebuah institusi internasional yang dimiliki oleh NEAT. Ciri yang pertama memperlihatkan bahwa NEAT merupakan sebuah jaringan yang terdiri dari kelompok akademisi yang memiliki keahlian atau kompetensi mengenai kebijakan internasional. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lahir dari adanya penelitian yang relevan. Dari ciri khas diatas menggambarkan bahwa NEAT berada pada tahap Epistemic Community dalam tingkatan institusi internasional Ruggie. Pada akhirnya hasil dari penelitian ini membenarkan hipotesis yang dipaparkan pada awal penulisan. Bahwa interaksi dari negara-negara anggota NEAT berhasil mewujudkan proses institusionalisasi NEAT dalam kerjasama APT. Hingga tahun 2009 proses institusionalisasi NEAT berada pada tahap Epistemic Community. NEAT berhasil memberikan sudut pandang dari ranah ilmu yang mampu memberikan gambaran hubungan politik.

Kata Kunci: NEAT, *second track diplomacy*, *think tank*, Epistemic Community, Institusi Internasional

ABSTRACT

Name : Arthanami Eka Krisima Pandjaitan
Study Program : International Relations
Title : **The Institutionalization of *Network of East Asian Think-tanks* (NEAT) in The ASEAN Plus Three Regionalism: 2006-2008**

This research aims to answer the question on “ How is the institutionalization of *Network of East Asian Think-tanks* (NEAT) in The ASEAN Plus Three Regionalism?”. The objective of this research is to get an explanation on the interaction between every country in the ASEAN Plus Three Regionalism on the NEAT institutionalization. This research uses the document research as the study method. As an international institution NEAT is an epistemic community As an epistemic community NEAT holds a variety of research which called as working groups. The result of the working group will be recommended as a policy recommendation. This recommendation will be delivered to the APT leaders to be amendment as a policy. Haas says, as a think tank NEAT directly identifies the state interests and illuminates the decision makers about the salient dimensions of the issue. After that the decision makers in one state may, in turn, influence the interests and behavior of other states. Different with another approachment the actor of an epistemic community is an individual states but still sometimes there tends to be a hegemony of idea in the process of policy decision. In balance with Ikenberry theory that if there is any leading state joins an international institution then that sleading state will ripe another weaker state in order to pursues their interests. This research suggests that NEAT should enhance the institutionalization as the first official think tank in APT regionalism.

Key words: NEAT, second track diplomacy, think tank, Epistemic Community, International Institution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Permasalahan	8
I.3 Tujuan Penelitian	8
I.4 Kajian Pustaka	9
I.5 Kerangka Teori	10
I.5.1 Intergrasi Ekonomi	10
I.5.2 Institusi Internasional.....	12
I.5.3 Institusi International Modern	13
I.5.3.1 Epistemic Community	15
I.5.3.2 International Organization.....	17
I.5.3.3 International Regime.....	18

I.6 Asumsi	19
I.7 Hipotesis	19
I.8 Metodologi Penelitian	19
I.9 Sistematika Penulisan	20
II. PERKEMBANGAN KERJASAMA ASIA TIMUR	22
II.1 Kerjasama Asia Timur dan Perkembangannya	22
II.1.1 ASEAN - China	23
II.1.2 ASEAN - Jepang	25
II.1.3 ASEAN - Korea Selatan	26
II.2 Profile NEAT	26
II.2.1 Tujuan NEAT	29
II.2.2 Struktur dan Mekanisme NEAT	30
II.2.2.1 Coordinator Country Meeting (CCM)	30
II.2.2.2 Working Group (WG)	31
II.2.2.3 Annual Conference (AC)	31
II.2.3 NEAT Sebagai Institusi	32
II.3 Pertemuan CCM ke 6 - CCM ke 10	35
III. ANALISIS CCM ke 6 - CCM ke 9	37
III.1 CCM ke 6	38
III.1.1 Rancangan Keuangan NEAT	38

III.1.2 Co-Interim Coordinators	40
III.1.3 Action Plans (APs) dari WG NEAT	41
III. 1.4 Perkembangan WG	42
III.1.5 WG Lainnya	42
III.1.6 Kegiatan NEAT Selanjutnya.....	43
III.1.7 Co-Interim Coordinators	44
III.1.8 Host AC ke 6.....	46
III.2 CCM ke 7	52
III.2.1 Overall Architecture of Community Building in East Asia.....	52
III.2.2 East Asian Financial Cooperation dan East Asia Investment Cooperation.....	53
III.2.3 Enhancement of Cultural Exchange in East Asia	55
III.2.4 Regional Cooperation Framework for Migration Labor.....	c6
III.2.5 Energy Security Cooperation in East Asia.....	57
III.2.6 Joint Report dan Track 1	58
III.2.7 Hal - hal Lainnya.....	59
III.2.8 Joint Report, WG Baru dan Chairman Selanjutnya	61
III.3 CCM ke 8	65
III .3.1 Pembukaan CCM dan WG Istimewa	65
III.3.2 Arah dan Tujuan NEAT pada Masa Mendatang.....	65
III.3.3 Rekomendasi Kebijakan NEAT.....	67
III.3.4 Pembentukan Task Force	68

III.3.5 Revisi Basic Rules NEAT.....	69
III.3.6 Enhancement of Cultural Exchange in East Asia	70
III.3.7 Basic Rules.....	70
III.3.8 Hasil WG NEAT	71
III.3.9 Pertemuan CCM Selanjutnya di Bali, Indonesia.....	72
III.4 CCM ke 9	76
III.4.1 Penyambutan dan Pengesahan Agenda Rapat.....	76
III.4.2 Pengesahan Minutes CCM ke 8.....	76
III.4.3 East Asia Financial Cooperation.....	77
III.4.4 East Asia Investment Cooperation.....	78
III.4.5 Enhancement of Cultural Exchange in East Asia	81
III.4.6 East Asia Environmental Cooperation.....	83
III.4.7 Regional Cooperation Framework for Migration Labor.....	86
III.4.8 Future Direction of NEAT	88
III.4.9 Website NEAT	92
III.4.10 Drafting Commite dan Joint Report	93
III.4.11 Joint Report.....	94
III.5 NEAT Sebagai Epistemic Community	100
IV PENUTUP	105
IV. I Kesimpulan.....	105
IV 2 Saran	106
DAFTAR REFERENSI	108